



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perilaku masyarakat yang awalnya tradisional berubah menjadi modern, merupakan akibat dari berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju (Alyda, 2020). Dimana segala kegiatan yang awalnya dilakukan secara monoton, terkendala oleh lambatnya proses pekerjaan karena dilakukan secara manual tanpa adanya campur tangan teknologi berkembang menjadi lebih cepat, tanggap dan tentunya lebih terstruktur serta mengurangi kendala seputar kecepatan dalam bekerja. Akibatnya, dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju mengharuskan pemerintah untuk membuat inovasi layanan publik yang berbasis teknologi agar dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk memberikan layanan publik berbasis teknologi yaitu dengan mengubah sistem pemerintahan yang sederhana menjadi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Layanan publik menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dapat meningkatkan pelayanan dari pemerintah ke bisnis (*Government-to-business/G2B*), pemerintah ke masyarakat (*Government-to-citizen/G2C*), Pemerintah ke ekonomi (*Government-to-Economic/G2E*), dan pemerintah ke pemerintah (*Government-to-Government/G2G*).

Berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat dengan SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adanya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik ini juga memiliki kesesuaian dengan Undang – Undang nomor 4 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, dimana dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 bahwa informasi publik dapat diakses secara cepat atau terupdate dan tentunya



dengan biaya murah serta media yang sederhana. Namun, adanya kebijakan tersebut belum mampu memberikan kepercayaan masyarakat secara penuh apabila belum ada kebijakan atau regulasi yang secara jelas menerangkan kualitas pelayanan berbasis elektronik seperti keamanan yang diberikan oleh pemerintah dalam melindungi identitas pribadi (Azmi, 2019).

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk membahas kebijakan yang sistem ini terapkan dalam pelayanan masyarakat suatu daerah dan untuk pendataan kinerja aplikasi dan infrastruktur penunjang SPBE pada Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel yang pada akhirnya akan memberikan pelayanan publik atau pelayanan masyarakat yang berkualitas. Kegiatan evaluasi implementasi SPBE ini mulai diterapkan sejak tahun 2019 dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Kepala Teknologi Pemerintahan (*Government Chief Technology*) di provinsi Sumatera Selatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu Dinas Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan komunikasi dan informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan memiliki fungsi dibagian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di berbagai bidang dalam lingkup pemerintahan. Selain itu, tugas lainnya ialah dalam melakukan pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara atau daerah, melakukan pembinaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika serta melakukan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Hal yang menjadi permasalahan disini ialah kegiatan evaluasi implementasi SPBE di provinsi Sumatera Selatan saat ini masih dilakukan dengan cara yang kurang efektif dan belum berjalan dengan baik, yakni pengumpulan dan penulisan datanya masih dilakukan dengan cara diketik satu persatu di *Microsoft Word* kemudian mengirimkan *soft file* atau *hard file* hasil evaluasi tahap pertama tersebut ke Kemenpanrb untuk kemudian dilakukan evaluasi implementasi SPBE tahap



kedua (eksternal). Melalui wawancara yang sudah penulis lakukan, saat ini provinsi Sumatera Selatan belum memiliki aplikasi untuk menginput dan mengirimkan langsung data evaluasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tersebut ke tim Tim Penanggung Jawab.

Berdasarkan permasalahan diatas maka dibutuhkan aplikasi evaluasi terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dapat mempermudah tim evaluasi internal dan eksternal untuk menjalankan tugasnya menginput dan mengirimkan langsung hasil evaluasi mandiri SPBE di provinsi Sumatera Selatan. Dimana aplikasi ini akan memberikan pelayanan input data evaluasi secara langsung tanpa perlu repot mengetik setiap kategori pertanyaan seputar evaluasi serta menyediakan tempat untuk memasukan data dukung berupa PDF yang dapat menguatkan pendapat serta penilaian dari hasil evaluasi yang dilampirkan. Hasil evaluasi akan langsung muncul ketika sudah di *submit* tanpa perlu menunggu lagi proses pengiriman *soft file* atau *hard file* data.

Oleh karena itu penulis bermaksud untuk membuat sebuah aplikasi berbasis *website* yang berjudul “**Aplikasi Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam laporan ini yaitu “Bagaimana Aplikasi Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dapat dilakukan Menggunakan *Website*?”.

1.3 Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah dalam penulisan laporan akhir ini agar tidak menyimpang dari permasalahan yang dikemukakan di atas, yaitu aplikasi ini dibuat untuk digunakan agar mempermudah tugas tim evaluasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam menginput dan mengirimkan hasil evaluasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahap pertama yang dilakukan setahun sekali pada Diskominfo.



1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari pembuatan laporan akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk membangun aplikasi evaluasi implemetasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

1.4.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Dapat membantu Dinas Komunikasi dan Informatika dalam membuat dan menjalankan evaluasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
2. Dapat mempercepat dan meningkatkan kinerja proses evaluasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Selatan.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Merdeka No.10, Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, 30136.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Metode Wawancara merupakan metode tanya jawab dan tatap muka secara langsung antara penulis dan narasumber. Dalam metode ini penulis melakukan wawancara pada tanggal 28 Maret 2023 dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada Kepala Seksi bidang *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan



Informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu Ibu Patricia Yulia Sitinjak S.H., M.Si. terkait proses dan sistem yang selama ini dilakukan mengenai evaluasi implementasi Sisem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai referensi penulis untu membuat laporan akhir ini.

2. Metode Studi Literatur

Menurut Zed dalam Kartiningrum (2018:4) metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian.

Menurut Daramadi dalam Kartiningrum (2018:4) melakukan studi literatur ini dilakukan oleh peneliti antara setelah mereka menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan, sebelum mereka terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

Pada laporan ini, penulis mengumpulkan data resmi DISKOMINFO Provinsi Sumatera Selatan mengenai informasi umum perusahaan melalui *website* resmi yang dimiliki oleh perusahaan. Penulis juga mengumpulkan referensi dari jurnal dan laporan dari berbagai sumber di internet dalam menyusun laporan akhir ini.

3. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penyusunan laporan akhir, maka laporan akhir ini dibagi dalam lima bab. Secara garis besar sistematika pembahasannya sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai yang dipakai dalam pembuatan laporan akhir yaitu, teori umum, teori khusus dan teori program.

**BAB III TINJAUAN UMUM**

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, pembagian tugas dan hal lain yang berhubungan dengan perusahaan serta uraian sistem yang sedang berjalan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil yang telah dicapai, berupa hasil perancangan, pembahasan, langkah-langkah membuat perancangan aplikasi serta cara penggunaan aplikasi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya diberikan saran-saran yang berisi kajian hal-hal yang masih dapat di kembangkan lebih lanjut.